Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia

Aliyana Farha Ramadina¹, Tajul Arifin²

Abstrak

Seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat di bidang ekonomi, meningkatkan pola hidup konsumtif dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan menjamurnya layanan Pinjaman Online di masyarakat, dengan segenap kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, Pinjaman Online sukses menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Namun masih banyak keraguan di masyarakat untuk menggunakan Pinjaman Online apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai prinsip Pinjaman Online dalam literatur fikih muamalah dan dasar penerapan praktik Pinjaman Online apakah termasuk riba atau tidak menurut Hadits Riwayat Muslim. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penulis menggambarkan hukum Qardh dalam fikih muamalah dan menggunakan berbagai kitab-kitab fikih sebagai sumber data penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan bahwa (1) Pinjaman diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia dan dianjurkan dalam Al-Quran dan Hadits; (2) Qardh boleh untuk dilakukan menurut hukum fikih muamalah; (3) Pinjaman Online diperbolehkan asal tidak melanggar prinsip syariah karena Pinjaman Online dan pinjaman konvensional merupakan hal yang sama, yang membedakan hanyalah teknologi; (4) Pinjaman Online yang terdapat bunga dalam pelaksanaannya dianggap riba dan haram untuk dilakukan.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Hukum Islam; Qardh; Riba

Abstract

As the development of technology has increased rapidly in the economic field, it has increased the consumptive lifestyle in society. This has led to the proliferation of Online Loan services in the community, with all the convenience and practicality offered, Online Loans has successfully attracted the attention of people who need loans. However, there are still many doubts in the community to use online loans. Online Loan whether it is in accordance with the rules in Islam. Therefore therefore, it is necessary preview an more about the principle of Online Loan principles in the fiqh muamalah literature and the basis for the application of the practice Online Loan whether it includes usury or not according to Hadith Muslim

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: aliyanafarha1@gmail.com

² Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: tajularifin64@uinsgd.ac.id

History. The author uses a qualitative research method with a descriptive approach, in which the author describes the law of Qardh in muamalah fiqh and uses various fiqh books as data sources for this research. Based on the research, it is found that (1) Loans are allowed in Islam as a form of mutual assistance between fellow human beings and recommended in the Al-Quran and Hadith (2) Qardh is allowed to be done according to the law of muamalah fiqh; (3) Online Loan are allowed as long as they do not violate sharia principles because Online Loan and conventional loans are the same thing, the only difference is technology; (4) Online Loans that contain interest in their implementation are considered usury and are forbidden to do.

Keywords: Online Loans; Islamic Law; Qardh; Riba

PENDAHULUAN

Dalam Islam diatur secara menyeluruh semua bagian keberadaan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhan dan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang bersosial, maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi sosial membutuhkan manusia lain. Sebab itu, manusia dihimbau untuk saling mengulurkan tangan serta bekerja sama untuk mengurangi beban sesama umat Islam.

Dalam Islam, diajarkan konsep muamalah yang mengatur permasalahan sehari-hari. Berdasarkan hukum muamalah ini, Islam memperbolehkan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak (Khosyiah, 2014: 6). Untuk memperjelas hal ini, Islam menyatakan bahwa setiap manusia yang berutang uang kepada pemberi pinjaman, dan setiap pinjaman yang dipinjam harus dikembalikan. Salah satu bagian yang disebut orang yang melakukan kejahatan dan berbuat dosa adalah debitur yang menolak membayar apa yang telah ia pinjam.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin meningkat dengan pesat di seluruh bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Semakin mudahnya dalam mengakses teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tidak langsung meningkatkan perilaku konsumtif dalam masyarakat, ancaman terlilit hutang akan membayangi jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

Saat ini, proses pinjam meminjam uang sangat mudah untuk dilakukan dan seringkali dijadikan opsi utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak. Praktik pinjam meminjam uang sudah ada sejak terciptanya uang sebagai alat transaksi. Pada

awalnya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat melakukan proses pinjam meminjam menjadi lebih cepat dan praktis melalui aplikasi Pinjaman Online.

Dalam praktik pinjam meminjam uang, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, penting untuk memperhatikan adanya prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari riba. Salah satu prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam praktik pinjaman adalah prinsip Qardh. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba. Dalam praktik Qardh, pemberi pinjaman hanya menyerahkan uang atau barang tanpa meminta keuntungan apapun dan peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam waktu yang disepakati tanpa bunga atau biaya tambahan.

Pinjaman Online menawarkan kemudahan untuk masyarakat yang serba ingin praktis, hal ini sukses menarik banyak perhatian. Layanan Pinjaman Online-pun semakin menjamur di masyarakat antara lain Kredivo, Ada Kami, Shopee Pinjam, Tunai Kita, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2018, akumulasi jumlah pinjaman yang telah dipinjamkan menembus 11 triliun rupiah. Namun, dibalik kemudahan yang ada, Pinjaman Online juga diikuti konsekuensi yang patut diwaspadai yaitu riba.

Islam sebagai agama yang menyeluruh, tentunya hadir mengatur sistem perekonomian umat. Ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dibalut dengan aturan Islam, di dalam ekonomi Islam ada hukum ekonomi Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama (Fauzi, Mulyaningsih dan Lutfiah, 2018: 1638). Dalam hukum ekonomi Islam, tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memikirkan keadilan, kejujuran, dan kepentingan orang banyak.

Dalam ekonomi Islam, Allah SWT telah memberikan kemudahan dalam proses pinjam meminjam, salah satunya adalah Qardh yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. (Fauzi, Mulyaningsih dan Lutfiah, 2018). Menurut Pasal 19 Huruf E UU No. 21

Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah “Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.” Sedangkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan nasabah wajib untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam pada waktu yang disepakati.

Dalam Islam juga, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri seperti orang normal, melainkan berdiri seperti orang yang sedang kerasukan (kemasukan syaiton), hal ini disebabkan karna mereka berkata (berpendapat) bahwasanya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dengan masih banyaknya umat Muslim yang belum mengetahui prinsip Pinjaman Online dalam literatur fikih muamalah dan dasar penerapan praktik Pinjaman Online di dalam Hukum Islam apakah termasuk riba atau tidak menurut Hadits Riwayat Muslim (Nurhadi, 2019: 75). Maka dari itu penulis perlu untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai prinsip Pinjaman Online dalam literatur fikih muamalah serta dasar penerapan praktik Pinjaman Online di dalam Hukum Islam apakah termasuk riba atau tidak menurut Hadits Riwayat Muslim.

LANDASAN TEORITIS

Jika teks hukumnya berupa Hadits, Tajul Arifin menyarankan agar faktor-faktor yang berkaitan dengan riwayat dan dirayah dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh (Arifin, 2014: 3). Jika teks hukumnya berupa ayat-ayat Al-Quran, maka *asbab al-nuzul* (sebab turunnya) ayat tersebut harus dipertimbangkan dengan baik (Federspiel, Arifin dan Hidayat, 1996: 16). Teknik apa pun dapat digunakan untuk menafsirkan kembali literatur Islam demi mencapai kemaslahatan yang

dikehendaki oleh *syara'*, selama metode tersebut didukung oleh mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan, menurut Tajul Arifin, legitimasi metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (kesimpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016: 6).

Unsur syariah dalam transaksi keuangan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konteks aplikasi teknologi keuangan, seperti Pinjaman Online. Bergantung pada jenis literatur yang digunakan sebagai referensi, ada metodologi khusus yang harus diperhatikan saat menafsirkan dan memahami hukum syariah. Tajul Arifin merekomendasikan agar isu-isu yang terkait dengan sejarah dan dirayah diteliti dan dianalisis secara seksama untuk dokumen hukum berupa Hadits. Sementara itu, *asbab al-nuzul* (alasan diturunkannya) ketentuan hukum apapun yang merupakan ayat-ayat Al-Quran harus diperhatikan dengan baik.

Namun, terlepas dari pendekatan yang digunakan, sangat penting untuk memastikan bahwa metode tersebut didukung oleh mayoritas ahli dan mematuhi prinsip syariah yang dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran hukum agama seperti *riba* dalam transaksi keuangan, termasuk Pinjaman Online.

Studi ini didasarkan pada landasan teoritis teknologi keuangan (*fintech*), yang didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital pada kebutuhan finansial. Beragam Hadits menyebutkan bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) adalah perilaku yang akan mendapatkan pertimbangan dari Allah SWT. pada waktunya nanti. Namun, jika Pinjaman Online melibatkan *riba*, hal tersebut tergolong perbuatan haram atau termasuk hal yang dilarang dalam Islam.

Hukum Islam (*fiqh*) adalah sistem hukum Islam yang berusaha untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits untuk kehidupan sehari-hari. Inti keuangan Islam terletak pada pemahaman dan penerapan Fiqh Muamalat. Kesadaran masyarakat akan ajaran Fiqh Muamalat semakin berkembang dewasa ini dengan suksesnya implementasi dan pertumbuhan industri keuangan syariah.

Sistem hukum Islam yang dikenal dengan hukum Islam (*fiqh*) mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk uang. Cabang *fiqh* yang dikenal dengan *fiqh muamalat* berkaitan dengan muamalah, atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh Muamalat yang menetapkan hukum-hukum yang harus diikuti dalam melaksanakan

pinjam meminjam yang sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam perbankan syariah. Keberhasilan sektor keuangan syariah dalam memberikan tambahan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan produk keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Fiqh Muamalat. Sektor keuangan Islam masih berkembang pesat, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara lain dengan populasi Muslim yang cukup besar.

Banyak penelitian hukum Islam seperti ini mempertimbangkan perspektif *fiqh* (yurisprudensi Islam) saat menganalisis masalah-masalah tersebut. (Djalil, 2001) Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis berdasarkan *uṣūl al-fiqh*. Apalagi, masalah itu sendiri adalah konsep yang luas, yang bisa saja disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah dan *takāful*.

Riba sering digunakan sebagai istilah Islam untuk bunga yang dibebankan pada pinjaman, dan keyakinan ini didasarkan pada bahwa ada konsensus di kalangan umat Islam bahwa semua bunga pinjaman dari bank adalah riba dan oleh karenanya hal tersebut dikategorikan haram. Argumen yang bertentangan pada pelarangan tersebut berpendapat bahwa Quran dan Hadits tidak memberikan bukti yang jelas bahwa bunga pinjaman adalah riba. Beberapa mencatat kata-kata dari ayat 3:130, yang menyatakan bahwa meminjamkan tanpa memungut bunga, "adalah di antara perbuatan baik" (*Mustahabb*) yang "direkomendasikan secara khusus dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadits".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah

Pinjaman diartikan sebagai memakai kepemilikan orang lain selama waktu tertentu yang telah disepakati bersama dan juga diartikan sebagai pengalihan hak milik atas suatu harta. Hal ini merupakan makna dari *Qardh* yang berasal dari kata *Qaradha* dalam Bahasa Arab yang artinya memotong. *Qardh* menurut syari dijelaskan sebagai pemberian harta dengan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dimanfaatkan dengan benar dan akan dikembalikan di lain waktu.

Dalam Islam, Qardh adalah salah satu jenis pinjaman yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada prinsip kepedulian dan kasih sayang antar sesama, di mana orang yang mampu memberikan bantuan atau pinjaman harus berupaya membantu orang yang membutuhkan. Pemberian Qardh juga diharapkan dapat membantu penerima dalam mengatasi kesulitan keuangan tanpa harus terbebani oleh bunga atau keuntungan lainnya. Qardh dapat dianggap sebagai bentuk filantropi atau amal yang dilakukan oleh umat Muslim. Qardh juga memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat, terutama untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis kecil dan menengah, dan juga sebagai sarana bantuan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks uang dan perbankan, frasa "*qardh*" atau "*qardh hasan*" mengacu pada suatu jenis pinjaman yang dikeluarkan dengan maksud memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa membebankan keuntungan atau bunga kepada peminjam. Dalam bahasa Arab, *qardh hasan* secara harfiah diterjemahkan menjadi "pinjaman yang sangat baik."

Dalam kenyataannya, *qardh hasan* sering diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang nyata dan mendesak seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, atau modal awal. Pemberi pinjaman hanya akan meminta peminjam mengembalikan uang yang dipinjamkan secara penuh dalam situasi ini, tanpa biaya atau bunga tambahan.

Salah satu alat keuangan yang digunakan dalam peradaban Islam untuk menegakkan keadilan dan keberlanjutan sosial dikenal dengan istilah *qardh hasan*. Hal ini agar pemberi pinjaman dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan ikatan sosial dalam masyarakat dengan menawarkan pinjaman tanpa bunga. Namun penting untuk diingat bahwa *qardh hasan* bukanlah investasi atau cara bagi pemberi pinjaman untuk menghasilkan uang. Akibatnya, hanya mereka yang benar-benar membutuhkan dan dapat dipercaya untuk mengembalikan uang tepat waktu yang diberikan *qardh hasan*.

Qardh hasan, atau transaksi ekonomi, adalah jenis muamalah dalam konteks keuangan Islam dan harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi praktik

riba (bunga) yang haram (terlarang), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan muamalah.

Para pihak yang melakukan transaksi qardh hasan dalam hal ini wajib memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang diakui. Dalam rangka memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini dimaksudkan agar semua transaksi keuangan dapat dilakukan secara adil, jujur, dan transparan.

Qardh hasan adalah istilah dalam keuangan Islam yang mengacu pada bentuk pinjaman tanpa bunga. Konsep ini sangat penting dalam hukum syariah, karena melarang adanya riba atau bunga dalam urusan bisnis. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah biasanya menawarkan qardh hasan kepada klien yang membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak, seperti biaya medis atau pendidikan, atau sebagai modal awal untuk usaha. Dalam pemberian qardh hasan, bank tetap berpegang pada prinsip-prinsip qardh, seperti melakukan transaksi secara sukarela dan mengungkapkan penggunaan uang secara terbuka. Selain itu, bank juga menetapkan waktu pengembalian yang jelas dan memastikan bahwa peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Nasabah yang tidak ingin meminjam uang dari lembaga keuangan tradisional dengan bunga tinggi juga dapat menggunakan qardh hasan sebagai penggantinya. Meskipun distribusi qardh hasan tidak secara langsung menguntungkan pemberi pinjaman secara finansial, namun bank syariah dapat memperoleh keuntungan secara tidak langsung melalui hal-hal seperti biaya administrasi dan layanan lainnya. Dalam situasi ini, qardh hasan dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor keuangan syariah dan membantu mereka yang membutuhkan akses pembiayaan yang adil dan sesuai syariah.

Dalam melakukan muamalah, ada prinsip yang harus diikuti, antara lain: (Abdurrahman, 1997: 14)

1. Segala bentuk muamalah diperbolehkan sesuai dengan perkembangan bentuk dan kebutuhan hidup masyarakat asalkan tidak melanggar hukum Islam.
2. Tidak mengandung unsur pemaksaan dan dilakukan secara sukarela.
3. Mengutamakan nilai keadilan dalam bertransaksi.

4. Tidak mengandung unsur penganiayaan.
 5. Memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Dalam melakukan muamalah, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari, yaitu:(Anwar *et al.*, 2020: 4)
1. Melakukan transaksi dengan merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dinamakan dengan Maisyir.
 2. Tidak terdapat kejelasan objek dalam bertransaksi, seperti barang dagangan yang tidak dapat diserahkan, jumlah harga yang tidak jelas, dan belum ditetapkannya waktu pembayaran. Hal ini disebut sebagai Gharar.
 3. Transaksi tidak boleh dilakukan atas benda atau hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti narkoba dan minuman beralkohol.
 4. Riba adalah mengambil keuntungan tambahan dari transaksi jual beli dan utang piutang. Riba dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Riba Nasiah merupakan pembayaran tambahan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. (2) Riba fadhil merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis dengan jumlah yang lebih banyak.

Dalam Islam, *qardh* adalah salah satu jenis transaksi yang dikenal dengan istilah muamalah. Landasan hukum Al-Quran diungkapkan melalui pelaksanaan *Qardh*, dengan definisi berupa sebagai pinjaman yang diberikan secara cuma-cuma dengan maksud membantu mereka yang membutuhkan. Ayat-ayat yang dimaksud, di antaranya:

Surat Al-Baqarah ayat 245:

“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”

Artinya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Surat Al-Taghabun ayat 17:

“إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ”

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”

Surat Al-Hadid ayat 11:

“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ وَلَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ”

Artinya:

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Surat Al-Hadid ayat 18:

“إِنَّ الْمُسْتَدِقِينَ وَالْمُسْتَضِقَاتِ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ”

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”

Ayat-ayat Al-Quran tersebut menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan Qardh atau meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Allah SWT menjanjikan imbalan akan melipatgandakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain. Allah SWT juga berfirman bahwa utang diperbolehkan untuk dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan harta yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan digunakan sebaik-baiknya. Peminjam juga wajib mengembalikan harta yang dipinjam sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Selain dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, melalui hadits, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk melakukan Qardh, hadits tersebut antara lain:

Hadits Riwayat Imam Bukhari:

“حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ”

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [’Abdul ’Aziz bin ’Abdullah Al Uwaisiy] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] dari [Tsauro bin Zaid] dari [Abu Al Goits] dari [Abu Hurairah radliallahu ’anhu] dari Nabi shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu.”

Melalui hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai waktu yang disepakati, dan dilarang untuk tidak membayar hutang yang dipinjam. Islam menganggap hutang dan meminjam sebagai kegiatan yang halal yang dapat dilakukan di kalangan umat Islam. Peminjam, bagaimanapun, diminta untuk bertanggung jawab dan mematuhi komitmen mereka untuk membayar utang pada waktu yang tepat. Prinsip akuntabilitas dan keadilan Islam tercermin dalam tugas ini.

Sebagai umat Islam, menjunjung tinggi akhlak dan nama baik dengan berpegang teguh pada janji dan komitmen yang telah dibuat merupakan sebuah kewajiban, termasuk yang berkaitan dengan hutang dan pinjaman. Dalam pelaksanaannya, shighat (izin), aqidan (pihak yang bertransaksi), dan qardh (harta yang dipinjamkan) adalah tiga rukun atau syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Qardh.

Shighat (izin dan ijab), menunjukkan kesepahaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Akad Qardh harus dilaksanakan dengan pernyataan persetujuan yang dipahami bersama dan diungkapkan secara jelas agar mengikat secara hukum. Peminjam harus dengan tegas menerima tawaran pemberi pinjaman untuk meminjamkan properti dalam situasi ini, dan sebaliknya. Untuk mencegah kesalahpahaman di masa mendatang, pernyataan izin harus eksplisit. Qardh tidak dapat dilakukan tanpa adanya ijab, seperti dalam jual beli yang menunjukkan

kerelaan, karena ijab yang diberikan juga menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *Qardh* yang kedua dikenal sebagai "pihak yang bertransaksi", atau aqidan. Pemberi pinjaman dan peminjam adalah pihak yang terlibat dalam transaksi di *Qardh*. Karena *Qardh* adalah akad yang didasarkan pada kerelaan, pemberi pinjaman harus meminjamkan dengan bebas dan tanpa paksaan. Sementara itu, peminjam harus cerdas, berpengalaman, dan mandiri. Akal dalam hal ini menunjukkan kemampuan untuk memahami akibat dari akad *qardh* yang telah dipenuhi. Baligh menunjukkan kematangan dan kemampuan peminjam untuk mempertimbangkan implikasi dari pinjaman yang diberikan. Sedangkan independensi menunjukkan kebebasan peminjam untuk bertindak tanpa campur tangan dari pihak luar.

Harta pinjaman dalam akad *qardh* diatur oleh rukun ketiga yang dikenal dengan *qardh* (harta yang dipinjamkan). Agar pinjaman itu halal, maka harta yang dipinjamkan haruslah sesuatu yang boleh dimasukkan dalam akad salam. Karena *Qardh* adalah akad harta, maka harta yang dipinjam harus merupakan benda yang dapat digunakan; jika tidak ada kesempatan pemanfaatan, undang-undang tersebut batal. Harta yang dipinjamkan harus berupa benda berwujud yang dapat diberi nomor, diukur, ditimbang, dan diukur. Oleh karena itu, pinjaman itu harus dalam bentuk barang yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh peminjam.

Jika rukun dan syarat *Qardh* telah dipenuhi, maka *Qardh* sah dan diperbolehkan untuk dilakukan. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *Qardh* yang harus diikuti. Prinsip *Qardh* pada kondisi ketika seseorang membagikan hartanya kepada orang lain untuk diatur dengan ketentuan pengaturan dengan dibagi antara kedua belah pihak. Pengaturan prinsip *Qardh* diantaranya:

1. Pada akad *Qardh* hendaknya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan apapun, di mana pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam sama-sama rela dan berakal sehat.
2. Barang yang dipinjamkan dalam transaksi *Qardh* harus jelas diketahui oleh pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam berapa jumlah dan berapa kadar ukurannya.
3. Barang yang dipinjamkan dalam transaksi *Qardh* harus jelas diketahui pemanfaatannya dan penggunaannya oleh pihak

pemberi pinjaman. Jika sesuatu yang dipinjam akan digunakan sebagai modal kerja, pihak pemberi pinjaman harus mengetahui dengan pasti apa jenis pekerjaannya. Hal ini sebagai pertanggungjawaban dari pihak peminjam.

4. Pinjaman harus dikembalikan sesuai waktu yang telah ditetapkan atas keputusan bersama sebelumnya, pinjaman juga dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan kemauan pihak pemberi pinjaman.
5. *Qardh* diperuntukkan untuk mendapat keuntungan yang merupakan hak pihak-pihak yang melakukan transaksi, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam akad besar atau akad kecil.

Namun, diperbolehkan dalam Islam jika peminjam memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman sebagai tanda penghargaan. Konsep *Qardh* ini dapat digunakan dalam berbagai keadaan, seperti mendukung teman atau anggota keluarga yang membutuhkan uang, memberikan pinjaman kepada badan amal, atau membantu mereka yang ingin mendirikan perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa *Qardh* adalah semacam solidaritas sosial yang ditekankan Islam selain sebagai transaksi keuangan. Gagasan *Qardh* dapat digunakan dalam platform pinjaman peer-to-peer (pinjaman P2P) hari ini untuk memberi mereka yang tidak memiliki akses ke bank tradisional kemampuan untuk menerima pinjaman. Untuk memastikan bahwa transaksi tetap sah dan sejalan dengan prinsip syariah Islam, persyaratan *Qardh* harus dipenuhi.

Penerapan Praktik Pinjaman Online dalam Hukum Islam

Semakin menjamurnya layanan Pinjaman Online dengan segenap kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan Pinjaman Online. Pinjaman Online merupakan jenis pinjaman yang dapat dilakukan secara *online* dengan persyaratan minimal, hanya membutuhkan kartu identitas diri dan foto. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses penyalurannya juga sangat cepat.

Namun, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, layanan Pinjaman Online juga melibatkan beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh para calon peminjam. Salah satunya adalah

tingginya bunga yang dikenakan, yang sering kali melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, terdapat juga risiko terjadinya penyebaran data pribadi peminjam oleh pihak penyelenggara layanan Pinjaman Online, tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peminjam.

Dalam hukum Indonesia, Pinjaman Online dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi yaitu, menjelaskan bahwa informasi elektronik merupakan kumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, suara, kode akses, symbol dan lain sebagainya, transaksi elektronik ini merupakan perilaku hukum yang dilakukan menggunakan sarana komputer atau sarana elektronik sejenisnya.

Layanan Pinjaman Online dapat dikategorikan sebagai perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Pasal 1754 KUHP yang menjelaskan bahwa hutang atau pinjaman merupakan transaksi antara dua pihak yang saling meminjam dan meminjamkan uangnya.

Hutang piutang merupakan salah satu jenis muamalah yang digunakan oleh masyarakat untuk saling membantu ketika mereka membutuhkan setiap hari. Hukum Islam memperbolehkan siapa saja untuk meminjam uang asalkan dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Kreditur didesak untuk meminjamkan kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan.

Islam memandang hutang piutang sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang saling membutuhkan antara yang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam harta. Memberi dan melunasi utang merupakan amanat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil dari sudut pandang agama. Islam mengatur bahwa pemberian hutang harus dilakukan dengan sukarela dan ikhlas, tanpa menuntut imbalan apapun, bahkan sekecil apapun. Demikian pula, pengembalian hutang harus dilakukan dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang telah disepakati bersama, tanpa menambah atau mengurangi jumlah hutang yang seharusnya dibayar. Dalam Islam, mengabaikan kewajiban untuk membayar hutang dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang meminjam untuk memperhitungkan kemampuan dan kebutuhan sebelum meminjam,

dan memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk membayar hutang tepat waktu.

Kelangsungan hidup dan legitimasi jenis pinjaman ini di bawah hukum Islam, bagaimanapun, telah menjadi sorotan mengingat munculnya layanan Pinjaman Online. Menurut beberapa ahli Islam, penggunaan pinjaman internet dengan bunga yang dikenakan padanya bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yang melarang riba. Riba sendiri adalah perbuatan menyalahgunakan pinjaman uang, yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, agar tidak merugikan konsumen dan masyarakat luas, maka perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah Islam dalam muamalah, khususnya dalam konteks Pinjaman Online.

Hal ini menunjukkan perlunya aturan yang tepat dan ketat untuk penggunaan pinjaman internet agar mematuhi dasar-dasar hukum Islam. Sejumlah negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pinjaman internet, termasuk Indonesia, yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, dengan memperkenalkan sistem bagi hasil atau *mudharabah*, teknologi dapat dimanfaatkan untuk merampingkan transaksi pinjaman *online* sesuai dengan ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, kesinambungan dan validitas pembiayaan *online* semacam ini dalam hukum Islam dapat dipastikan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah Islam dalam muamalah dan kontrol yang ketat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam sistem hukum Indonesia selain peraturan perundang-undangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional memiliki tanggung jawab mengeluarkan fatwa yang membahas kegiatan komersial lembaga keuangan, termasuk apakah barang dan jasa yang ditawarkan mematuhi prinsip syariah. Penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi harus berpegang pada prinsip syariah, seperti tidak boleh melakukan riba, *maisir*, *gharar*, *zhulm*, *dharar*, dan haram, seperti:

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi wajib mematuhi akad Qardh yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, dan prinsip kesesuaian dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Akad yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan seperti akad ijarah, akad al-bai, musarakah, mudharabah, wakalah bil ujroh, dan qardh, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan jasa pembiayaan berbasis teknologi informasi.
3. Pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam sertifikat elektronik harus memastikan bahwa penerapan tanda tangan elektronik dapat terjamin validitas dan autentifikasinya, berlandaskan peraturan undang-undang yang ada.
4. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, pihak penyelenggara dapat memungut biaya untuk menggunakan layanan berlandaskan prinsip ijarah atau prinsip penyediaan sistem dan sarana prasana layanan.

Berdasarkan fatwa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan Pinjaman Online hukumnya boleh untuk dilakukan asalkan dalam praktiknya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya riba. Dalam peminjaman juga harus ditentukan akad yang adil, wajar, dan sesuai dengan syariah.

Namun faktanya, di luar sana sangat banyak layanan Pinjaman Online yang menerapkan bunga sangat tinggi yang mencekik dan memiliki sistem penagihan yang kejam dengan memanfaatkan data pribadi peminjam. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang disyaratkan dalam Islam.

Struktur bunga yang digunakan dalam Pinjaman Online disebut dalam Islam sebagai riba, yang bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, disarankan untuk memilih bisnis Pinjaman Online yang memiliki standar syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memungut bunga. Akan tetapi, layanan pembiayaan internet yang sesuai syariah belum diatur secara khusus pada undang-undang tertentu di Indonesia.

Transaksi riba dalam transaksi utang piutang adalah mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang, hal ini dilarang dengan tegas dalam Islam karena riba dapat mengeksploitasi dan merugikan orang lain. Dalam Pinjaman Online, riba dapat terlihat dari sistem pengembalian uang pinjaman yang berbunga, artinya peminjam dana telah mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dalam Islam, riba didefinisikan sebagai mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang dengan cara yang tidak adil dan tidak seimbang. Terdapat dua jenis riba yang dilarang, yaitu:

1. Riba Karena Penundaan (Nasi'ah)

Riba karena penundaan adalah tambahan atas pembayaran yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman sebagai bayaran atas penundaan pelunasan utang. Bahkan pada zaman sekarang, riba ini menjadi lebih mengerikan, kewajiban membayar bunga tambahan sudah diberikan saat jatuh tempo pertama.

2. Riba Akibat Selisih (Fadhli)

Riba akibat selisih adalah riba yang seringkali terjadi di dunia barter, riba ini dilakukan dengan menukar suatu barang dengan barang lainnya yang sejenis tetapi dilebihkan jumlahnya sebagai syarat dari pihak lain.

Larangan riba ini diperjelas dalam ayat-ayat suci Al-Quran yaitu: Surat An-Nisa ayat 29:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat Ali Imran ayat 130:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”

Selain dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, melalui hadits, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk melakukan *Qardh*, hadits tersebut antara lain:

Hadits Muttafaq'alah:

“اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ”

Artinya:

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina."

Hadits Riwayat Muslim:

“لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ”

Artinya:

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)."

Berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut terlihat jelas betapa laknatnya perilaku riba di mata Allah SWT dan Rasulullah SAW, baik orang yang memakan harta riba, orang yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan Pinjaman Online yang mengandung riba dianggap haram walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka.

Penerapan Praktik Pinjaman Online dalam Hukum Positif Indonesia

Pinjaman Online berbasis teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam memenuhi dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien (Yanuarsi dan Hijawati, 2022: 286). Namun, konsumen layanan ini perlu mengetahui semua bahaya yang terkait dengan pinjaman online. Oleh karena itu, pengguna jasa pinjaman online harus memiliki perlindungan hukum. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara terkait perlindungan hukum konsumen. Penyelenggara harus merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia.

Konsumen terus menderita karena saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan Pinjaman Online. (Hasela, 2020). Banyak pengguna layanan aplikasi Pinjaman Online telah menyuarakan keprihatinan tentang masalah yang melibatkan pembagian informasi pribadi mereka oleh penyelenggara Pinjaman Online tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Pasal 26 UU ITE mengatur perlindungan hukum atas informasi pribadi peminjam saat menggunakan layanan Pinjaman Online.

Perlindungan hukum bagi peminjam pinjaman internet dalam praktiknya masih dipandang kurang memadai. Ada beberapa contoh perusahaan Pinjaman Online atau pihak ketiga yang ceroboh menyalahgunakan data pribadi konsumen untuk kepentingan mereka sendiri. Konsumen yang menanggung kerugian akibat penyakit ini mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut. Agar pengguna Pinjaman Online merasa lebih aman dan terlindungi saat menggunakan layanan ini, diperlukan aturan yang lebih ketat dan efektif untuk mengatur keamanan data pribadi. Perlindungan data pribadi di ranah digital diatur dalam Pasal 26 UU ITE, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan regulasi ini diterapkan secara efektif dalam konteks Pinjaman Online.

Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur Pinjaman Online salah satunya dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerbitkan kebijakan dan regulasi khusus untuk perlindungan konsumen terkait Pinjaman Online di Indonesia (Kurniawan, 2019).

Menurut Triasih, (Triasih, Muryati dan Nuswanto, 2021: 12), "Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan." Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur Pinjaman Online. Dengan membuat undang-undang dan peraturan khusus untuk perlindungan konsumen

terkait pinjaman online di Indonesia, OJK menawarkan perlindungan hukum bagi nasabah.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman Online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman Online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknnya (Antyasty dan Andraini, 2021: 143). Oleh karena itu, diperlukan sanksi dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen. Sanksi tersebut diberikan kepada penyelenggara Pinjaman Online yang melanggar dan merugikan pihak lain³. Pembatasan kegiatan usaha juga dapat diberikan sebagai sanksi, seperti pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian Pinjaman Online, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Selain itu, penyelenggara juga harus mematuhi peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun berasal dari asal-usul yang terpisah, hukum dalam hadits-hadits sejarah Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kapasitas untuk berinteraksi dan berdampak satu sama lain dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dalam beberapa hal, salah satunya adalah fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar yang mengikuti syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Terlebih lagi, hukum positif Indonesia memasukkan sejumlah kaidah hukum yang terdapat dalam hadits-hadits masa lalu umat Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan ketertiban. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUD 1945 dan KUHP, yang menjamin terpeliharanya hak asasi manusia dan ketertiban umum, mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks ini, hubungan antara hukum positif Indonesia dengan hukum dalam hadits-hadits sejarah Islam dapat dilihat sebagai hubungan yang saling menguatkan dan melengkapi. Hukum positif Indonesia dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sedangkan hukum dalam hadits-hadits riwayat muslim dapat memberikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-

hari yang dapat dijadikan dasar pembentukan masyarakat Indonesia yang lebih baik. hukum positif dan lebih adil.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam memperbolehkan praktik pinjam meminjam sebagai wujud muamalah antar sesama manusia. Pinjam meminjam ini diartikan sebagai *Qardh* yaitu pemberian harta dengan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dimanfaatkan dengan benar dan akan dikembalikan di lain waktu. Dalam Islam, dianjurkan untuk pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, dan diperbolehkan untuk meminjam uang apabila diperlukan.

Dalam melakukan *Qardh*, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi yaitu transaksi dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan siapapun, barang yang ditukarkan harus jelas ukuran, nilai tukar, dan pemanfaatannya, waktu pengembalian harus disesuaikan kesepakatan bersama, dan tidak melanggar prinsip syariah, salah satunya yaitu riba.

Namun, kenyataannya, praktik Pinjaman Online yang beredar banyak menerapkan bunga tinggi untuk peminjam, sehingga hal ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam dan berdasarkan Hadits Riwayat Muslim, perbuatan riba ini dilaknat perbuatannya oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sehingga, praktik Pinjaman Online tetap diperbolehkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional No.177/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, jika Pinjaman Online ini menerapkan sistem pengembalian uang yang berbunga, Pinjaman Online ini berubah hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (1997) *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Antyasty, D.L. dan Andraini, F. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjam Meminjam Berbasis Online," *Jurnal Pro Hukum*, 11(2).
- Anwar *et al.* (2020). "Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih

- Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018," *Tazkiya*, 2.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Djalil, M. bin A. (2001) *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Fauzi, F.N., Mulyaningsih, D.A. dan Lutfiah, W. (2018) "Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam," *El-Qist*, 8(2), hal. 1638–1658.
- Federspiel, H.M., Arifin, T. dan Hidayat, R.T. (1996) *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hasela, R.N. (2020). "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online," *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 7 April. Tersedia pada:https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online.
- Khosyiah, S. (2014). *Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kurniawan, R. (2019). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurhadi. (2019). "Tematik Hadis Tentang Riba Dalam Kitab Shahih Bukhari," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi SYariah*, 2(1), hal. 75–90.
- Triasih, D., Muryati, D.T. dan Nuswanto, H. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Konsimen dalam Perjanjian Pinjaman Online," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yanuarsi, S. dan Hijawati. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online," *Solusi*, 20(2).